

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 48 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI
 TERINTEGRASI TAHUN 2018-2019

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DIY
 RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2018 - 2019

NO	POIN KOMITMEN (Permasalahan)	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2018 (B=Bulan)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2019 (B=Bulan)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Melaksanakan Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD yang mengakomodir kepentingan publik serta bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting							
a. Perencanaan								
1)	Belum terintegrasinya Aplikasi e-monev dengan e-sakip	Sistem Pengendalian harusnya sinkron dengan capaian kinerja	1. Pengembangan Aplikasi e-monev dan mengintegrasikan dengan e-Sakip	Bappeda, Bagian Organisasi, Dinas Kominfo	Aplikasi e-monev terintegrasi dengan e-Sakip dan diimplementasikan saat Pelaporan Sakip	B12 : Pengembangan Aplikasi e-Monev yang terintegrasi dengan e-Sakip	B12 : Implementasi aplikasi e-monev dengan e-Sakip	
2)	Sistem Aplikasi Penganggaran (SIMDA) belum terintegrasi dengan aplikasi perencanaan	Mengintegrasikan Sistem Aplikasi Penganggaran (SIMDA) dengan Sistem Aplikasi Perencanaan	Mengintegrasikan Sistem Aplikasi Penganggaran (SIMDA) dengan Sistem Aplikasi Perencanaan	Bappeda, BKAD, Dinas Kominfo	Tersusunnya konsep integrasi Sistem Aplikasi Penganggaran (SIMDA) dengan Sistem Aplikasi Perencanaan dan implementasinya	B12 : Tersedianya konsep integrasi Sistem Aplikasi Penganggaran (SIMDA) dengan Sistem Aplikasi Perencanaan	B06 : Sosialisasi & Bimtek implementasi integrasi Sistem Aplikasi Penganggaran (SIMDA) dengan Sistem Aplikasi Perencanaan B12 : Implementasi integrasi Sistem Aplikasi Penganggaran (SIMDA) dengan Sistem Aplikasi Perencanaan	
3)	Proses Perencanaan melalui Aplikasi Perencanaan belum sepenuhnya memuat dokumen-dokumen perencanaan secara lengkap	Sistem Perencanaan harusnya memuat Pokok-Pokok Pikiran Dewan yang sudah pasti sehingga tidak dimungkinkan lagi adanya tambahan-tambahan usulan lain melalui Pokok-Pokok Pikiran Dewan diluar prosedur dan ketentuan waktu	Pengintegrasian sistem aplikasi Pokok-pokok Pikiran DPRD-(AspirasiKU) kedalam Sistem Aplikasi Perencanaan (Rencana-ku)	BAPPEDA, Anggota DPRD, Sekretariat DPRD, BKAD, Dinas Kominfo	1. Pokok Pokok Pikiran DPRD terintegrasi dalam sistem aplikasi AspirasiKu	B12 : Penyempurnaan sistem AspirasiKu	B03 : Implementasi integrasi link akses sistem Pokok Pokok Pikiran DPRD (AspirasiKu) ke dalam sistem perencanaan (RencanaKU)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2. AspirasiKu terintegrasi dengan RencanaKu 3. Anggota DPRD memperoleh User ID	B12 : Penyusunan konsep integrasi link akses sistem Pokok Pikiran Dewan (AspirasiKU) ke dalam Sistem Perencanaan (rencanaKu)		
4)	Pelaksanaan Reses DPRD belum tertib dan belum memperoleh hasil optimal.	Pelaksanaan reses supaya tertib dan akuntabel serta menghasilkan hasil yang kongkrit dan terukur.	1. Penyusunan regulasi pelaksanaan reses dan fasilitasi reses	Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	1. Pelaksanaan reses tertib dan akuntabel	B06 : Penyusunan regulasi pelaksanaan reses dan fasilitasi reses	B03 : Implementasi regulasi reses	
b. Penganggaran								
1)	Sudah memiliki peraturan dan aplikasi terkait ASB dan sudah digunakan dalam tahap perencanaan penganggaran tapi belum terintegrasi di aplikasi SIMDA	Sistem aplikasi penganggaran (SIMDA) belum mengintegrasikan peraturan ASB	Mengintegrasikan sistem aplikasi penganggaran (SIMDA) dengan peraturan ASB	BKAD, Bappeda, Dinas Kominfo, Bagian Hukum	Aplikasi penganggaran (SIMDA) terintegrasi dengan peraturan ASB		B9 : Review peraturan ASB B12 : Implementasi integrasi sistem aplikasi SIMDA dengan peraturan ASB hasil review	
2 Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis elektronik termasuk pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurement.								
a. Pengadaan Barang dan Jasa								
1)	Anggota kelompok kerja masih berstatus di OPD masing-masing (<i>ad hoc</i>)	Kelembagaan PBJ yang permanen, independen dan mandiri, dengan anggota kelompok kerja yang permanen (fungsional pengadaan yang tidak rangkap jabatan)	1. Menghitung kebutuhan formasi atau kebutuhan anggota kelompok kerja 2. Mengidentifikasi anggota kelompok kerja yang berpotensi dipindahkan ke BLP dan atau menjadi pejabat fungsional pengelola pengadaan 3. Melakukan proses pemindahan dan atau inpassing	BKPP, Bagian Organisasi BKPP	Terwujudnya SDM anggota kelompok kerja yang profesional dan mandiri (Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan) Terisnya sebagian jabatan fungsional pengadaan	B03 : Tersusunnya Peraturan Bupati formasi atau kebutuhan anggota kelompok kerja B09 : Teridentifikasinya anggota kelompok kerja yang berpotensi dipindahkan ke BLP dan atau menjadi pejabat fungsional pengelola pengadaan B12 : Terisnya sebagian jabatan fungsional pengadaan		
2)	Belum dilaksanakannya konsolidasi pengadaan	Konsolidasi Pengadaan	Menyusun inventarisasi paket pengadaan barang/jasa pada tahun 2018	TAPD, OPD KP	Terwujudnya Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa	B03 : Tersusunnya inventarisasi paket pengadaan barang/jasa pada tahun 2018	B03 : Tersusunnya inventarisasi paket pengadaan barang/jasa pada tahun 2018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<p>B09 : Tersusunnya daftar paket yang bisa dilakukan konsolidasi</p> <p>B12 : Terlaksananya pembinaan kepada PA/KPA OPD KP dengan arahan konsolidasi</p>	<p>B09 : Tersusunnya daftar paket yang bisa dilakukan konsolidasi</p> <p>B12 : Terlaksananya pembinaan kepada PA/KPA OPD KP dengan arahan konsolidasi</p>	
3)	Keterlambatan pengisian SIRUP	Integrasi SIRUP dengan SIMDA	<p>1. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan OPD terkait integrasi SIRUP</p> <p>2. Melakukan sosialisasi dan Pengisian SIRUP</p> <p>3. Melakukan sosialisasi kepada anggota kelompok kerja, OPD KP, dan penyedia</p>	TAPD, OPD	Terwujudnya Integrasi SIRUP dengan SIMDA	<p>B03 : Terlaksananya penyusunan integrasi SIRUP dengan SIMDA</p> <p>B6 : Terlaksananya integrasi SIRUP dengan SIMDA</p> <p>B12 : Terlaksananya sosialisasi integrasi SIRUP dengan SIMDA Tahun 2019</p>		
4)	Masih menggunakan SPSE versi lama	Upgrade SPSE versi terbaru	Koordinasi dengan LKPP terkait upgrade SPSE versi terbaru	BLP, LKPP	Terupgradenya SPSE versi 4.2	B12 : Lancarnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		
5)	Kelambatan Koordinasi terkait dengan SPSE	Kelembagaan BLP	Mengusulkan kajian perubahan kelembagaan Bagian Layanan Pengadaan	Bagian Organisasi	Tersusunnya dokumen kajian perubahan kelembagaan BLP	B12 : Terwujudnya dokumen kajian perubahan kelembagaan Bagian Layanan Pengadaan		
6)	Penambahan Standar LPSE	Usulan penambahan standar LPSE	Mengusulkan penambahan standar LPSE	Dinas Kominfo	Berkas usulan penambahan standar LPSE kepada LKPP	B12 : Tersampainya Berkas usulan penambahan standar LPSE kepada LKPP		
7)	Belum adanya penilaian kepada Penyelenggaran Pelayanan Pengadaan	Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan	1. Melakukan diskusi dan rapat terkait penyusunan Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan dengan mengundang POKJA dan OPD terkait	BLP, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPP, Irda	Tersusunnya Perbup tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan dan draft Perbup tentang Manajemen Resiko	B03 : Terlaksananya rapat terkait penyusunan draft Perbup tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2. Menyusun draft Perbup tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan			<p>B06 : Tersusunnya Perbup tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo</p> <p>B12 : Terlaksanannya sosialisasi Perbup tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo kepada Personil BLP dan POKJA</p> <p>B12 : Tersusunnya draft Perbup tentang Manajemen Resiko</p>		

3	Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan proses penerbitan perijinan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang transparan dan jelas dengan mengoptimalkan teknologi informasi							
a	Belum semua jenis perizinan dan non perizinan dilimpahkan ke PTSP	Revisi/Perubahan Peraturan Bupati Nomor 116 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan	Pendelegasian/Pelimpahan semua perizinan dan non perizinan kewenangan DPMPPT dari Kepala Daerah ke PTSP	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, OPD Terkait	Diterbitkannya Perubahan Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian/Pelimpahan Perizinan dan non Perizinan	<p>B03 : Identifikasi semua jenis perizinan dan non perizinan</p> <p>B09 : Penyusunan draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian/Pelimpahan Perizinan dan Non Perizinan</p>		
						B12 : Terbitnya Peraturan Bupati tentang Pendelegasian/Pelimpahan Perizinan dan Non Perizinan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
b	<p>Belum Seluruh Pelayanan Perizinan di DPMPPT KP menggunakan sistem aplikasi online, baru 4 urusan (SPIPISE, SIPJAKI, SIPO, KSWP) belum semua jenis/sector perizinan yang menjadi kewenangan DPMPPT dapat dilayani secara online langsung kepada masyarakat</p> <p>Catatan : SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) SIPJAKI (Sistem Informasi Pengawasan Jasa Konstruksi) SIPO (Sistem Informasi Perusahaan Online) KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak)</p>	Rancang bangun sistem aplikasi yang mampu mengintegrasikan seluruh sektor perijinan	Implementasi seluruh sistem perizinan secara online untuk seluruh sektor perizinan	DPMPPT KP dengan Tim Teknis	Penerapan sistem aplikasi perizinan dan non perizinan secara online yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, tidak terjadi deviasi antara realisasi izin terbit dengan SOP yang terlalu besar yaitu (1) Pemohon cukup mendaftar izin dengan membuka website DPMPPT, mengisi data dan upload berkas yang diperlukan dimana saja (online). (2) Pemohon dapat memantau proses perizinan dan non perizinan melalui data pelacakan perizinan yang ada di website . (Tracking System) (3) ersedianya mekanisme pengaduan secara online	B03 : Identifikasi dan pemetaan Sektor perizinan yang akan dibuatkan sistem online.	B09 : Pembuatan Sistem Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi	
c.	Belum adanya kerjasama tentang pelaksanaan program jaminan sosial	Disusun Kerjasama BPJS dengan DPMPPT	Penandatanganan kerjasama BPJS dengan DPMPPT	Sekda, Bappeda, Dinas Naketrans, DPMPPT dan BPJS	Terlaksananya Kerjasama BPJS dengan DPMPPT tentang Pelaksanaan Program Jaminan Soaial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kulon Progo	B09 : Perjanjian Kerjasama antara BPJS dengan DPMPPT tentang Pelaksanaan Program Jaminan Soaial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kulon Progo selesai ditandatangani		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						B12 : Implementasi Perjanjian Kerjasama		
d.	Belum ditetapkannya Review RTRW Kabupaten dan belum tersedianya RDTR sesuai Review RTRW	Penetapan Review RTRW Kab dan Penyusunan RDTR	1. Review RTRW : Percepatan Rekomendasi Peta dari BIG, Percepatan rekomendasi dari BKPRD Propinsi dan Percepatan persetujuan substansi Review RTRW dari Kementerian ATR, Percepatan Pembahasan Raperda Review RTRW 2. Percepatan Penyusunan Raperda RDTR	DPRD, Bappeda, Dinas Pertanian dan Tataruang, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas LH, Bag Hukum	Ditetapkannya Raperda Review RTRW menjadi Perda RTRW Ditetapkannya Raperda RDTR Perkotaan menjadi Perda RDTR Kawasan Perkotaan Tersusunnya Raperda RDTR LP2B	B12 : Penetapan Perda RTRW B12 : Pembahasan RDTR kawasan Perkotaan dengan DPRD	B12 : Penetapan Perda RDTR Kawasan Perkotaan B12 : Tersusunnya Raperda RDTR LP2B	
4	Melaksanakan tata kelola Dana Desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel							
	Penggunaan Dana Desa belum terintegrasi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	Penerapan Siskeudes	Penerbitan Instruksi Bupati	Dinas PMD Dalduk & KB, Inspektorat, Kecamatan, BPKP	Diterapkannya Aplikasi Siskeudes pada 87 Desa	B03 : Pendampingan penerapan Siskeudes, monitoring & pelaporan		
5	Melaksanakan penguatan APIP yang kompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai							
a	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di Inspektorat KP masih sangat kurang bila dibanding dengan Formasi Kebutuhan (Kebutuhan 62 orang JFT, baru terisi 28 orang JFT)	Menambah jumlah pegawai pada Jabatan Fungsional Tertentu secara bertahap	Mengajukan usulan penambahan PF Auditor	Inspektorat, BKPP, Bagian Organsiasi	Bertambah jumlah JFT sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pegawai minimal 50% dari kekurangan yang ada	B12 : Terisinya sebagian kebutuhan jabatan fungsional auditor		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
b	Kapabilitas (akreditasi) APIP/Inspektorat Daerah masih level 2	peningkatan kapabilitas menjadi level 3	PKS/PPM/Bimtek tentang Kapabilitas APIP Melaksanakan Pemenuhan Kapabilitas APIP	Inspektorat, BPKP Inspektorat, BPKP	memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko serta memelihara / meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng garaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, agar dapat memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun SDM.	B03 : Pelatihan Kantor Sendiri tentang Kapabilitas APIP B09 : Level 3		
6 Melakukan pembaruan peraturan LHKPN dan Membentuk Unit Pengelola LHKPN serta membangun Sistem Pengendalian Gratifikasi dan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi								
a.	Kepatuhan LHKPN	Melakukan pengelolaan LHKPN serta membangun sistem pengendalian	1. Melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan Pengisian LHKPN melalui e-filing LHKPN 2. Menerapkan sanksi bagi Wajib Lapo r LHKPN yang tidak melaporkan hartanya ke KPK 3. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan harta kekayaanya	BKPP, Bagian Hukum, Inspektorat BKPP, Bagian Hukum, Inspektorat BKPP, Bagian Hukum, Inspektorat	Meningkatnya pelaporan wajib LHKPN Meningkatnya pelaporan wajib LHKPN Meningkatnya pelaporan wajib LHKPN	B03 : Sudah terlaksana pendampingan kepada wajib LHKPN B09 : Penerapan sanksi berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 bagi Wajib LHKPN yang tidak melaporkan harta kekayaannya ke KPK setelah tanggal 31 Maret 2018 (Batas waktu pelaporan berakhir) B12 : Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Pelaporan LHKPN		
	Kepatuhan LHKPN Anggota DPRD	Melakukan pengelolaan LHKPN Anggota DPRD	1. Melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan Pengisian LHKPN melalui e-filing LHKPN	Sekretariat DPRD, Anggota DPRD, Tenaga Ahli Fraksi	Meningkatnya pelaporan wajib LHKPN	B03 : Sudah berjalan dengan melaksanakan pendampingan kepada wajib LHKPN		
			2. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan harta kekayaanya	Sekretariat DPRD, Anggota DPRD, Tenaga Ahli Fraksi	Meningkatnya pelaporan wajib LHKPN	B12 : Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Pelaporan LHKPN		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
b.	Belum terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Pemkab KP	Membentuk UPG pada Pemkab KP	1. Menyusun draft Pembentukan UPG	Inspektorat, BKPP, Bagian Hukum, Bagian Organisasi	Terbentuknya UPG pada Pemkab KP	B09 : Rancangan Perbup ttg UPG Pemkab		
7 Membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan								
a.	Rapat-Rapat DPRD							
1)	Pemasangan CCTV di gedung DPRD masih sebatas untuk pemantauan keamanan yang dipasang di lorong-lorong, belum memasang CCTV di ruang rapat yang sering digunakan untuk memantau aktivitas rapat-rapat DPRD dengan eksekutif.	Agar Sekretariat DPRD memasang CCTV pada ruang rapat yang sering digunakan.	Memasang CCTV pada ruang rapat yang sering digunakan.	Sekretariat DPRD	Terpasangnya 3 (tiga) CCTV di ruang rapat DPRD yang sering digunakan (Ruang Rapat Paripurna, Ruang Nakula dan Ruang Sadewa)	B12 : Berfungsinya CCTV pada ruang rapat yang sering digunakan.		
a.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	optimalisasi Aduan Masyarakat melalui aplikasi LAPOR	1. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang LAPOR. 2. Sosialisasi dengan memanfaatkan portal resmi pemerintah Kelompok Informasi Masyarakat, dan berbagai media sosial.	Dinas Kominfo, 42 OPD, 87 Desa, BUMD, media cetak & elektronik	1. Tersusunnya Perbup tentang LAPOR 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, kualitas tata kelola pemerintahan.	B06 Penerbitan Peraturan Bupati tentang LAPOR B09 : Sosialisasi Perbup, monitoring dan evaluasi penggunaan LAPOR		
b.	Koneksi Jaringan Internet tidak stabil	Perlu melakukan migrasi jaringan internet menggunakan <i>Fiber Optic</i> (FO) untuk meningkatkan kualitas Layanan Koneksi Internet Pemerintah Daerah	Pembangunan/ Sewa Jaringan <i>Fiber Optic</i>	TAPD, Diskominfo	Peningkatan kualitas layanan koneksi internet Pemerintah Daerah menggunakan <i>Fiber Optic</i>	B06 : Tersedianya Dokumen perencanaan, B09 : Pembangunan fisik jaringan <i>fiber optic</i> , B12 : Meningkatnya kualitas layanan koneksi internet Pemerintah Daerah		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 Melaksanakan perbaikan manajemen ASN/PNS dan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja								
a.	Belum optimalnya manajemen PNS	Melaksanakan perbaikan manajemen ASN/PNS	1. Penyusunan manajemen talenta untuk menuju <i>merit system</i>	BKPP, Bappeda, BKAD, Bagian Organisasi, Inspektorat, Bagian Hukum	Tersusunnya hasil test potensi dan kompetensi bagi calon pejabat pimpinan tinggi pratama dan calon administrator	<p>B03: Screening/pemetaan calon pejabat struktural dengan melaksanakan pengukuran kompetensi bagi calon pengawas, calon administrator, calon jpt pratama. Khusus untuk calon JPT pratama dilaksanakan melalui mekanisme seleksi terbuka.</p> <p>B06 : Uji Kompetensi/ assesment center bagi calon JPT</p> <p>B09 : Penyiapan pengembangan (<i>leading & mentory</i>) : a. Diklatpim Tingkat II, b. Diklatpim Tingkat III dan Diklatpim Tingkat IV, c, diklat teknis dan fungsional serta diklat Prajab/Latihan dasar</p> <p>B12 : a. Diklat calon kader pengawas sekolah, b. Diklat struktural pejabat tinggi pratama dan administrator, c, diklat teknis dan fungsional</p>		
			2. Penyusunan Evaluasi Jabatan dengan metode FES		Tersusunnya Evaluasi Jabatan dengan metode FES	<p>B06: Menyusun Rekap Skor Evaluasi Jabatan</p> <p>B12 : a, Menyusun Informasi Faktor Jabatan b. Menyusun Peta Jabatan c. Tervalidasinya skor evaluasi jabatan oleh Kementerian PAN dan RB</p> <p>d. Diterbitkannya Berita Acara Hasil Evaluasi Jabatan</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
b.	TPP belum berbasis kinerja	Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja dengan sistem <i>Single Salary</i>	2. Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai berbasis kinerja	BKPP, Bappeda, BKAD, Bagian Organisasi, Inspektorat, Bagian Hukum	Tersedianya konsep dan formulasi Tambahan Penghasilan Pegawai berbasis kinerja	<p>B06 : Menyusun konsep dan formulasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja</p> <p>B12 : Pembuatan Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai (e-performance) yang telah terintegrasi dengan aplikasi pelaporan presensi pegawai</p> <p>B12 : Penerbitan Peraturan Bupati tentang TPP berbasis Kinerja</p>	B03 : implementasi aplikasi e-performance	
9 Melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur, dan aplikasi yang transparan dan akuntabel								
a.	Adanya barang milik daerah (aset) yang tidak berfungsi bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Melakukan proses pemindahtanganan aset dan pemanfaatan aset	<p>1. Inventarisasi aset yang tidak berfungsi</p> <p>2. Melakukan proses pemindahtanganan dan pemanfaatan aset</p>	BKAD, Bagian Hukum, Inspektorat, DPU, Tim Penghapusan BMD/Aset	<p>1. Terlaksananya insventarisasi aset yang tidak berfungsi</p> <p>2. Terlaksananya proses pemindahtanganan dan pemanfaatan aset</p>	<p>B12 :</p> <p>1. Tersedianya Data Aset yang tidak berfungsi</p> <p>2. Terlaksananya proses pemindahtanganan dan pemanfaatan aset</p>		
b.	Belum tersedianya database WP yang handal							
1).	Belum tersedianya SOP tentang mekanisme update berkala data WP	Tersedianya SOP tentang mekanisme update berkala data WP	Koordinasi dengan bidang pajak untuk merumuskan SOP	BKAD, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum	Tersedianya mekanisme tentang update berkala data WP yang ditetapkan dengan SK Kada/ Perkada	B.09 Penyusunan SOP tentang mekanisme update berkala data WP	B.03 Tersedianya SOP tentang mekanisme update berkala data WP ditetapkan dalam SK Kada/ Perkada	
						B.12 Penyusunan SK penetapan SOP tentang mekanisme update berkala data WP		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
c. Belum dilaksanakannya penerapan Tax Clearance								
1)	Pajak Daerah							
	Belum terlaksananya rekonsiliasi manual antara DPMPT dengan BKAD	Terlaksananya rekonsiliasi manual antara DPMPT dengan BKAD	Koordinasi dengan DPMPT untuk menyusun rencana pelaksanaan rekonsiliasi	BKAD, DPMPT	Dilaksanakannya rekonsiliasi manual antara DPMPT dengan BKAD tentang pajak daerah secara berkala	B.09 Koordinasi dengan DPMPT penentuan pelaksanaan rekonsiliasi Pajak Daerah		
						B.09 Rekonsiliasi manual antara DPMPT dengan BKAD tentang pajak daerah secara berkala		
2)	BPHTB							
	Belum terlaksananya rekonsiliasi manual antara BPN setempat dengan BKAD	Terlaksananya rekonsiliasi manual antara BPN setempat dengan BKAD	Koordinasi dengan Kantor Pertanahan kulon Progo untuk rencana pelaksanaan rekonsiliasi	BKAD, BPN Kulon Progo	Dilaksanakannya rekonsiliasi BPHTB secara manual antara BKAD dengan BPN Kulon Progo secara berkala	B.12 Melakukan Koordinasi dengan Kantor Pertanahan kulon Progo untuk rencana pelaksanaan rekonsiliasi BPHTB	B.03 Mulai dilaksanakannya rekonsiliasi BPHTB secara manual antara BKAD dengan Kantor Pertanahan Kulon Progo secara berkala	
3)	KSWP Pusat							
	Belum terlaksananya rekonsiliasi manual antara KPP Pajak setempat dengan Bapenda/ Dispenda	Terlaksananya rekonsiliasi manual antara KPP Pajak setempat dengan Bapenda/ Dispenda	Koordinasi dengan KPP Pratama Wates untuk rencana pelaksanaan rekonsiliasi pajak	BKAD, KPP Pratama Wates	Dapat dilaksanakannya rekonsiliasi manual antara KPP Pratama Wates dengan BKAD secara berkala	B.12 Koordinasi dengan KPP Pratama Wates untuk rencana pelaksanaan rekonsiliasi pajak	B.03 Mulai dilaksanakannya rekonsiliasi pajak secara manual antara KPP Pratama Wates dengan BKAD	

Wates, 30 Juli 2018
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO